

PENGEMBANGAN PERBIBITAN SAPI POTONG MELALUI MODEL KEMITRAAN, WARALABA DAN UP4S/UPTD DI SULAWESI TENGAH

Ir. Dahli Masahuri, MM.

Penyuluh Pertanian Ahli Madya Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

ABSTRAK

Penyediaan daging untuk memenuhi permintaan dalam negeri selama ini disuplai melalui produksi lokal dan impor. Ketergantungan impor tersebut dalam bentuk daging maupun sapi bakalan masih sulit diatasi, bahkan cenderung meningkat. Kondisi ini bertambah sulit dengan segala keterbatasan yang ada di masa *pandemic COVID-19* ini. Impor daging dan sapi bakalan mengalami penurunan yang sangat signifikan karena adanya pengurangan kapasitas produksi bahan pangan, penutupan jalan, pelabuhan dan bandara serta pembatasan transportasi yang memperlambat terjadinya arus distribusi bahan pangan dari produsen ke konsumen. Hal ini memerlukan konsep kemandirian pangan asal ternak melalui peningkatan populasi dan produktivitas usaha budidaya ternak serta mengupayakan sebanyak mungkin masyarakat dan swasta untuk menyelenggarakan budidaya dan pembibitan ternak, khususnya ternak sapi. Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi penyangga pangan nasional dikarenakan potensi sumber daya alam Sulawesi Tengah diharapkan mampu menyediakan kebutuhan pangan nasional salah satunya berupa daging sapi/kerbau melalui program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN). Beberapa masalah yang menjadi *bottleneck* pengembangan ternak sapi seperti sifat dan karakteristik pengembangan sapi, kebijakan yang belum komprehensif, skim pembiayaan yang terbatas, alih fungsi dan terbatasnya lahan penggembalaan, sumber bibit yang terbatas, manajemen dan model pengembangan yang belum efektif, kepastian harga dan pasar masih lemah, dan koordinasi yang lemah, perlu mendapat perhatian. Selain kemauan politik, juga diperlukan ketegasan kebijakan yang berpihak pada produk daging sapi dalam negeri dan peternak, pilihan model pengembangan yang efektif menjawab masalah mendasar yang dihadapi terutama pelibatan peternak sapi, seperti model Inti Plasma, model Waralaba (*franchise*), dan model Unit Pelaksana dan Pembinaan Peternakan Sapi (UP4S/UPTD).

Kata kunci: kinerja, kendala, kebijakan dan kemauan politik, model pengembangan sapi potong

PENDAHULUAN

Penyediaan daging untuk memenuhi permintaan dalam negeri selama ini disuplai melalui produksi lokal dan impor. Ketergantungan impor tersebut dalam bentuk daging maupun sapi bakalan masih sulit diatasi, bahkan cenderung meningkat. Kondisi ini bertambah sulit dengan segala keterbatasan yang ada di masa *pandemic COVID-19* ini; impor daging dan sapi bakalan mengalami penurunan yang sangat signifikan karena adanya pengurangan kapasitas produksi bahan pangan, penutupan jalan, pelabuhan dan bandara serta pembatasan transportasi yang memperlambat terjadinya arus distribusi bahan pangan dari produsen ke konsumen. Hal ini memerlukan konsep kemandirian pangan asal ternak melalui peningkatan populasi dan produktivitas usaha budidaya ternak serta mengupayakan sebanyak mungkin masyarakat dan swasta untuk menyelenggarakan budidaya dan pembibitan ternak, khususnya ternak sapi.

Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya pernah tercatat sebagai eksportir daging sapi. Tahun 1968–1973 rata-rata ekspor daging Indonesia mencapai 20.000 ton per tahun. Lalu apa yang terjadi ketika itu sehingga Indonesia bisa mengekspor daging? Ini sejarah sukses yang perlu dipelajari. Pasti ada faktor-faktor kunci yang harus dicari dan ditemukan sehingga terjadi keberhasilan dalam pengembangan sapi ketika itu. Menurut Nuhung (2015),

beberapa faktor kunci tersebut antara lain adalah, **Pertama**, penduduk Indonesia masih setengah dari saat itu (2015), padang penggembalaan sapi masih cukup luas, sehingga secara alami peternakan sapi berkembang dengan sendirinya di semua wilayah, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, Lampung, dan daerah lainnya. Daerah-daerah tersebut memasok kebutuhan sapi daerah lain melalui perdagangan antarpulau, selebihnya diekspor.

Kedua, pemotongan sapi selektif dalam pengertian hanya sapi jantan atau betina tidak produktif yang dipotong, sehingga betina produktif populasinya tetap dapat dipertahankan dan tetap dapat berkembangbiak dengan baik. Beberapa alasan pemotongan sapi betina produktif (SBP) oleh para Pejagal, yaitu (i) sapi jantan sebagian besar sudah dijual di luar daerah atau diperdagangkan antar pulau; (ii) harga SBP diperdagangkan antarpulau lebih murah dibanding dengan sapi jantan; (iii) sebagian Pejagal di daerah lebih memilih sapi kecil dan yang tersedia hanya SBP; dan (iv) belum ada kesadaran dari para pengembang kepentingan terhadap perlunya untuk mencegah pemotongan SBP (Puslitbangnak, 2013).

Ketiga, peternakan sapi selain dikembangkan oleh peternak, juga terdapat perusahaan atau *ranch* yang memelihara sapi sampai ribuan ekor yang memenuhi skala ekonomi, sehingga dapat bersaing di pasar

ekspor. Pertanyaan mendasar adalah mengapa para pengusaha *ranch* tersebut bubar? Apakah mereka bubar sendiri, dibubarkan, atau diskenarioikan supaya bubar? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu pengkajian komprehensif.

Berdasarkan potensi sumber daya alam, sumber daya genetik, teknologi, dan budaya masyarakat Indonesia, maka sesungguhnya Indonesia memiliki potensi yang besar untuk pengembangan ternak sapi.

Namun, karena pengelolaannya belum optimal, maka produksi ternak sapi tidak mampu mengejar perkembangan permintaan, baik untuk pasar domestik maupun untuk ekspor. Angka-angka statistik yang tersedia menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi sebesar 3,09% per tahun dan produksi daging sapi Indonesia menunjukkan pertumbuhan rata-rata 5,62% per tahun (2018-2020) seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Populasi dan Produksi Daging Sapi Indonesia, 2018 – 2020

Tahun	Populasi (ekor)	Produksi Daging (ton)
2018	16.432.945	497.971,70
2019	16.930.025	504.802,29
2020	17.466.792	515.627,74
Rataan(%)	3,09%	5,62

Sumber: Direktorat Jenderal PKH, Kementan (2020)

Tabel 1 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan produksi daging sapi lebih cepat dibanding dengan laju pertumbuhan populasi. Jika hal ini berlangsung terus atau tidak ada upaya peningkatan populasi yang signifikan, maka populasi akan terus menurun dan pada suatu saat di masa mendatang populasi sapi akan habis dan Indonesia akan tergantung pada impor sapi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi. Fenomena ini sudah mulai terasa sejak beberapa dekade terakhir dengan meningkatnya volume dan nilai impor baik dalam bentuk sapi hidup maupun daging sapi.

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi penyangga pangan nasional dikarenakan potensi sumber daya alam Sulawesi Tengah diharapkan mampu menyediakan kebutuhan pangan nasional salah satunya berupa daging sapi/kerbau melalui Program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN).

Melihat potensi dan masalah yang diuraikan di atas, maka Penulis mencoba merumuskan masalah pokok dan menawarkan model solusi bagaimana mengembangkan pembibitan sapi potong di Sulawesi Tengah dengan pola Kemitraan, Waralaba dan UP4S melalui pemanfaatan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Rumusan Masalah

1. Kebijakan program yang dirumuskan tidak disertai dengan rencana operasional yang rinci;
2. Terbatasnya inovasi daerah melalui implementasi model pengembangan sapi potong yang lebih

memperhatikan wilayah unggulan, disamping lebih berorientasi komoditas unggulan;

3. Implementasi program/ kegiatan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan evaluasi dampak program dan kegiatan karena ketidakjelasan antara program/ kegiatan *public goods* dengan *tol goods/ quasipublic goods*.

Tujuan

Mendapatkan suatu model pengembangan sapi potong di Sulawesi Tengah, sehingga Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi daerah penopang sumber pangan nasional yang bersumber dari daging ternak sapi/ kerbau.

Manfaat

Diharapkan akan menjadi bahan dalam penetapan kebijakan operasional pada kegiatan Pengembangan Sapi/Kerbau melalui program SIKOMANDAN di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Tahun 2020 mencatat bahwa populasi ternak Sapi di Sulawesi Tengah menempati urutan kedua terbanyak di Pulau Sulawesi, yaitu berturut-turut Sulawesi Selatan sebanyak 1.431.533 Ekor; Sulawesi Tengah 391.418 Ekor; Sulawesi Tenggara 357.086 Ekor; Gorontalo 253.960 Ekor; Sulawesi Utara 128.654 Ekor; dan Sulawesi Barat 112.662 Ekor. Selanjutnya dalam hal penyediaan daging sapi, Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai kontribusi terhadap populasi dan produksi daging Sapi Potong Nasional sebagaimana disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Populasi dan Produksi Daging Sapi Sulawesi Tengah, 2018 - 2020

Tahun	Populasi (ekor)	Produksi Daging (ton)
2018	343.630	4.693,39
2019	369.224	4.790,41
2020	391.418	5.010,52
Rataan (%)	3,09	5,62

Sumber: BPS (2018- 2020), Direktorat Jenderal PKH, Kementan (2020)

Data tersebut menunjukkan bahwa ternak sapi potong di Sulawesi Tengah sangat berpotensi untuk dikembangkan, baik melalui pengembangan padang penggembalaan, kawin alam (KA) maupun melalui inseminasi buatan (IB).

Sejak tahun 2014 sampai 2019 di Sulawesi Tengah telah dirintis pengembangan pembibitan sapi potong pada 3 (tiga) kabupaten melalui pengembangan padang penggembalaan sebagai *pilot project*, sebagaimana disajikan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Data Potensi Padang Penggembalaan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Lokasi	Tahun	Potensi Luas Padang (Ha)	Potensi Daya Tampung (Ha)	Luas Padang Dikelola (Ha)	Jumlah Kelompok (Klp)	Jumlah Sapi (Ekor)		Ket.
							Awal	Skrng	
1	Desa Kalel, Kec Pamona Timur Kab Poso	2014	1.500	1.500	100	9	90	20	SID Tahun 2014 (APBN)
2	Desa Didiri, Kec Pamona Timur Kab Poso	2014	1.500	1.500	100	9	90	25	SID Tahun 2014 (APBN)
3	Desa Mandula, Kec Lembo Raya Kab Morowali Utara	2015	200	200	100	9	100	96	SID Tahun 2015 (APBN)
4	Desa Watutau, Kec Lore Peore Kab Poso	2018	1.383	1.300	100	8	10	10	SID Tahun 2017 (APBD Prov)
5	Desa Alitupu, Kec Lore Utara Kab Poso	2018	2.883	2.800	320	1	18	18	SID Tahun 2018 (APBD Prov)
6	Desa Peonea, Kec Mori Atas Kab Morowali Utara	2018	900	900	700	10	200	-	SID Tahun 2017 (APBDP Kab Morut)

No	Lokasi	Tahun	Potensi Luas Padang (Ha)	Potensi Daya Tampung (Ha)	Luas Padang Dikelola (Ha)	Jumlah Kelompok (Klp)	Jumlah Sapi (Ekor)		Ket.
							Awal	Skrg	
7	Desa Tongko Kecamatan Tojo Kab. Tojo Unauna	2018	500	200	200	-	-	-	SID Tahun 2017 (APBDP Kab. Touna)
8	Desa Lenye Kecamatan Luwuk Utara Kab. Banggai	2018	100	100	-	-	-	-	-
9	Desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan Kab. Sigi	2018	250	250	-	-	-	-	-
10	Desa Air Terang Kecamatan Tiloan Kab. Buol	2019	119,28	200	110	2	200	-	SID Tahun 2017 (APBDP Kab. Buol)
JUMLAH			9.335	8.950	1.730	48	708	169	

Sumber : Disbunak Provinsi Sulawesi Tengah, Laporan Tahunan 2020

Dalam pengembangan padang penggembalaan di atas telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Perbaikan 9.335 Ha lahan padang rumput alam dengan memperbaiki vegetasi yang ada melalui introduksi rumput, melengkapi sarana dan prasarana serta fasilitas padang penggembalaan dengan membangun sumber air seperti embung dan mengalirkan ke bak-bak air di sekitar padang penggembalaan, membangun pagar keliling dan *paddock* serta membuat shelter-shelter tempat berteduh ternak.
- Membangun kebun-kebun HPT seluas 1730 hektar untuk ditanami rumput potong dan legume kaya protein, dengan jumlah kelompok yang melaksanakan kegiatan sebanyak 48 kelompok.
- Menambah jumlah Sapi Potong sebanyak 708 ekor untuk perbaikan mutu genetik Sapi yang sudah ada di sekitar dan di lokasi padang penggembalaan, namun kondisi sekarang tidak berkembangbiak bahkan hanya tersisa 169 ekor. Akan tetapi hasilnya belum menunjukkan kinerja yang

diharapkan, karena kontinuitas pengelolaannya belum profesional oleh Peternak serta keterbatasan biaya operasional bagi pengelolaan padang penggembalaan tersebut.

Model pengembangan yang dilakukan adalah mengedepankan pengembangan ternak rakyat dan semakin mengurangi peranan peternak besar atau *ranch*. Indonesia sejak 30 tahun terakhir tidak lagi memiliki sistem *ranch* yang memerlukan lahan luas (1 ekor/ha). Peternak besar (*feedlotters*) hanya memiliki kurang dari 2% dari populasi sapi potong nasional dan 98% merupakan peternak tradisional. Dalam ilmu ekonomi seperti diketahui bahwa usaha produksi dengan kuantitas yang lebih kecil cenderung harga pokoknya menjadi tinggi. Harga daging impor lebih murah karena diusahakan dalam skala besar sehingga harga pokok per satuan produk menjadi lebih rendah, akibatnya harga daging domestik tidak dapat bersaing dengan daging impor. Daging impor memiliki kualitas dan higienis yang lebih terjamin karena pengelolaan dan pemotongannya sudah moderen. Jadi, sepanjang diusahakan dengan

skala usaha kecil sangat sulit bersaing dengan daging sapi impor. Dalam beberapa dekade terakhir, hampir sudah sulit ditemukan usaha ternak sapi skala besar, padahal sampai dengan akhir tahun 1970-an banyak *ranch* yang dikembangkan oleh investor seperti yang banyak dijumpai di Sulawesi Selatan, NTT, NTB, Jawa Timur, dan Lampung. Program pembangunan ternak sapi yang dikembangkan oleh pemerintah pada umumnya untuk membangun peternakan rakyat, bahkan bantuan luar negeri untuk peternakan sapi hampir seluruhnya diarahkan untuk membangun peternakan rakyat dan tidak ada yang ditujukan untuk membangun peternakan skala menengah dan besar. Padahal peternak skala menengah inilah yang menjadi penggerak pembangunan peternakan.

Kebijakan dan Kemauan Politik.

Subsektor peternakan merupakan salah satu subsektor yang memberikan kontribusi pada perekonomian nasional serta mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, sehingga dapat diandalkan dalam upaya perbaikan perekonomian nasional. Hal tersebut tergambar dari hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013) bahwa jumlah rumah tangga peternakan di Indonesia hampir mencapai 13 juta rumah tangga. Di samping itu ketersediaan produk peternakan secara langsung akan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya untuk pemenuhan kalori dan protein hewani, (BPS, 2020).

Rendahnya kinerja pengembangan ternak sapi adalah pada dasarnya adalah problema dari hulu, yakni aspek kebijakan dan kemauan politik pemerintah. subsektor peternakan mestinya harus didukung oleh kebijakan pengembangan yang tegas dengan segala konsekuensi dan implementasinya. Apabila swasembada daging sapi telah menjadi komitmen nasional dan telah menjadi kemauan politik (*political will*) pemerintah, maka infrastruktur dan sumber daya pendukungnya harus dipenuhi; tidak hanya kebijakan di bidang pengembangan produksi, tetapi juga kebijakan di bidang distribusi dan perdagangannya yang mengutamakan dan menguntungkan produk dalam negeri. Kebijakan dan komitmen dari pemerintah yang lemah membuat pengembangan ternak sapi dalam negeri mengalami ketidakpastian yang tinggi, sehingga sulit untuk mewujudkan swasembada daging melalui program SIKOMANDAN.

Kondisi lingkungan eksternal dan internal saat ini tidak memungkinkan Indonesia. dalam waktu singkat dapat melakukan swasembada daging sapi karena (1) perdagangan yang semakin terbuka, tidak mungkin menghambat masuknya produk impor tanpa alasan yang kuat; (2) industri sapi potong yang sudah berjalan masih mengandalkan sapi bakalan dari impor; (3) industri sapi potong yang menggunakan bahan baku lokal selama ini tidak mampu mencukupi permintaan domestik; dan (4)

upaya swasembada pangan menyebabkan konsumsi daging sapi domestik menurun (Ilham, 2006).

Diperlukan kebijakan yang komprehensif dari hulu sampai hilir kegiatan pengembangan ternak sapi. Kebijakan di bidang pembibitan, lahan penggembalaan, pakan, harga output, sistem perdagangan baik ekspor-impor maupun antardaerah dan antarpulau, perlindungan dari penyakit ternak, kebijakan dibidang sistem pengembangannya, merupakan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan untuk memberi kepastian berusaha di bidang industri ternak sapi potong. Tidak kurang pentingnya adalah politik anggaran nasional dan fasilitas kredit perbankan dengan suku bunga rendah yang dialokasikan untuk membangun peternakan sapi. Demikian pula kebijakan nilai tukar dan perpajakan yang dapat menjadi insentif ekonomi bagi pelaku usaha. Kebijakan tersebut harus menjadi tekad dan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mengemas program-program pembangunan industri peternakan sapi potong secara berkelanjutan.

Perlindungan terhadap pengembangan sapi lokal unggul perlu dirumuskan dalam bentuk peta jalan yang menjadi pedoman pemerintah dan parlemen serta seluruh *stakeholders* ternak sapi potong. Regulasi dibuat sefleksibel mungkin, insentif fiskal dan moneter untuk mendorong investor melakukan investasi di bidang pengembangan sapi potong, baik di bidang pembibitan (*breeding farm*), di bidang pengembangan budi daya ternak termasuk *ranch*, RPH, di bidang pengembangan industri pakan dan farmasi, industri pengolahan dan perdagangannya. Kebijakan subsidi, insentif, dan fleksibilitas dari pemerintah akan banyak menentukan keberhasilan terobosan pengembangan industri peternakan sapi potong, apalagi jika melibatkan dunia usaha yang memerlukan kepastian usaha, memerlukan iklim usaha yang kondusif, tidak banyak terganggu oleh isu politik, keamanan, dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem manajemen pembangunan peternakan yang efektif dan produktif dengan mengakomodasi berbagai kepentingan tersebut sebagai sasaran utama. Cetak biru atau peta jalan pembangunan peternakan sapi yang sudah ada sebaiknya direformulasi dengan mengakomodasi perkembangan lingkungan strategis baik domestik maupun di dunia internasional yang bergerak dengan sangat cepat, mengakomodasi strategi mengantisipasi persaingan yang semakin ketat, politik ekonomi yang tidak sehat, sistem perdagangan yang tidak adil, dan dominasi negara-negara maju yang seringkali tidak bisa dihindarkan. Di dalam negeri permasalahan yang harus diakomodasi adalah sistem pengembangan ternak sapi yang belum efektif dan belum produktif, pengembangan ternak sapi rakyat, kelangkaan sumber daya lahan dan air, kekurangan bibit, dan kualitas produksi yang rendah.

Perencanaan pembangunan harus komprehensif dan tidak parsial dengan berdasar pada sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam,

sumber daya manusia, kelembagaan, teknologi, dan potensi pasar. Perencanaan juga harus mengakomodasi sifa- sifat biologis dan karakteristik ternak sapi, budaya peternak, dan persaingan dengan daging sapi impor. Antisipasi dinamika penyakit hewan yang selama ini menjadi masalah serius dalam peternakan sapi seperti penyakit kuku dan mulut (PMK), antraks, dan penyakit lainnya. Antisipasi dan penyesuaian terhadap perubahan iklim yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi pengembangan ternak sapi, sumber- sumber pakan, dan air.

Model Pengembangan Sapi Potong

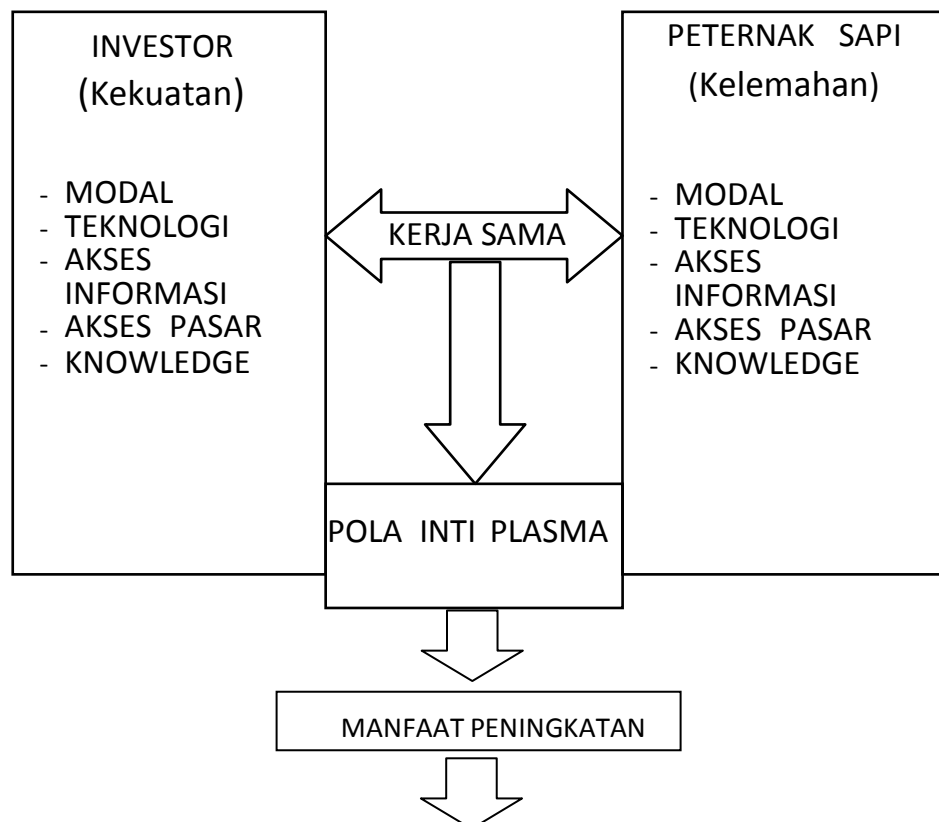
Pemilihan model pengembangan industri ternak sapi harus mampu mengakselerasi peningkatan populasi dan produksi daging sapi serta meningkatkan kesejahteraan peternak. Disamping itu, model pengembangan yang dikembangkan juga harus mampu meningkatkan daya saing produk daging sapi, melalui peningkatan produktivitas, peningkatan efisiensi dan perbaikan mutu hasil produksi melalui sistem manajemen mutu yang baik. Beberapa model pengembangan ternak sapi yang berpotensi untuk dikembangkan di Sulawesi Tengah, antara lain sebagai berikut:

1. Model Inti Plasma

Pola pembangunan inti plasma, merupakan model pembangunan yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan sekaligus diharapkan dapat

menyelesaikan berbagai masalah mendasar yng dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia (Nuhung,2003). Persoalan mendasar yang dihadapi oleh negara berkembang adalah kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan, keadilan, pem- bangunan pedesaan, urbanisasi, ketimpangan pendapatan, ketimpangan pembangunan antara desa dengan kota, dan antarwilayah. Filosofi pola inti plasma adalah meng- integrasikan usaha kecil/peternak dengan pengusaha besar/investor. Peternak memiliki sumber daya lahan, tenaga kerja, pengalaman beternak sapi potong, dan dapat menyediakan kandang, akan tetapi memiliki keterbatasan permodalan, teknologi, akses pasar, dan akses informasi.

Pengusaha besar yang kesulitan mencari lahan untuk memenuhi skala usaha, kesulitan dalam tenaga kerja, tetapi memiliki kekuatan pada aspek-aspek yang menjadi kelemahan peternak tersebut, seperti permodalan, teknologi, dan akses pasar sehingga jika bekerja sama akan terjadi sinergi yang kuat. Model ini juga merupakan upaya untuk mendorong dan memotivasi peternak mengembangkan usahanya secara komersial dan berorientasi pasar, sehingga peternak menjadi terbiasa berinteraksi dengan pasar. Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian agar pola kerja sama tersebut dapat berkembang sesuai dengan rencana. Skema kerja sama inti plasma untuk pembangunan peternakan sapi disajikan pada Gambar 1 berikut:



- POPULASI
- PRODUKSI
- KESEMPATAN KERJA
- PENDAPATAN
- NILAI TAMBAH
- EXTERNALITY

Gambar 1. Skema peternakan sapi pola inti plasma (Nuhung, 2015)

Melalui model inti plasma, kapasitas produksi menjadi lebih besar sehingga dapat memenuhi skala ekonomi usaha ternak sapi. Dengan terpenuhinya skala ekonomi makaterjadi efisiensi dan optimasi penggunaan sumber daya, sehingga mendorong peningkatan daya saing produk daging sapi. Terdapat sosial benefit bagi perusahaan inti dalam bentuk keamanan usaha karena terciptanya rasa memiliki dari peternak plasma terhadap usaha yang dibangun bersama. Tercipta iklim kondusif dalam pengembangan bisnis, sehingga dapat dijamin keberlanjutan usaha dalam jangka panjang karena adanya nilai tambah baik dalam bentuk ekonomi, sosial dan keamanan bagi plasma dan perusahaan inti. Pola ini akan mendorong terjadinya kerja sama yang saling menguntungkan dan juga saling ketergantungan yang merupakan perekat yang kuat dalam usaha peternakan sapi potong. Distribusi manfaat dan risiko merupakan salah satu daya tarik dari pola ini yang biasanya disepakati dalam perjanjian kerja sama.

Pengembangan sapi pola inti plasma akan menjadi suatu usaha skala besar/*corporate* yang akan menciptakan kesempatan kerja baru bagi masyarakat, sesuai dengan jenis pekerjaan dalam bisnis sapi. Kesempatan kerja tersebut dapat berupa tenaga manajerial, petugas lapangan perusahaan, kegiatan pendukung, pemasok sarana produksi dan pakan untuk keperluan bisnis sapi. Dengan demikian, pola pembangunan ini akan mengurangi urbanisasi, karena tersedianya kesempatan kerja di perdesaan. Perekonomian perdesaan akan berkembang sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang dipicu oleh bisnis sapi pola inti plasma yang memberikan efek ganda terhadap pendapatan, kesempatan kerja, aspek sosial, dan aspek kehidupan lainnya serta dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat dan ketimpangan pembangunan antara desa dengan kota. Pengembangan peternakan sapi pola PIP akan membentuk suatu kawasan agribisnis peternakan sapi yang merupakan model pembangunan wilayah (Muslim, 2006).

2. Model Waralaba (Franchise)

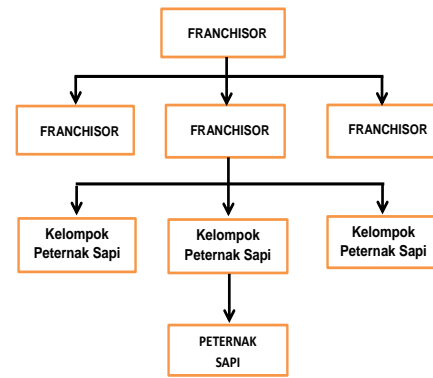
Bisnis model waralaba (*franchise*) telah menjadi tren di seluruh dunia, dan di Indonesia diperkenalkan dan mulai ramai sejak tahun 1970-an dengan munculnya *Kentucky Fried Chicken (KFC)*, *Shakey Piza*, *Burger King*, *Seven Eleven*, *Swensen*, dan lain-lain. Di dunia bisnis pertanian mungkin belum banyak diketahui dan dikembangkan pola *franchise* ini termasuk dalam usaha peternakan. Oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM) pola *franchise* dicoba di Indonesiakan dengan nama "waralaba" (Supardiono, 2014). *Franchise* berasal dari bahasa Perancis *affranchir*, yang berarti *to free* yang artinya membebaskan. British Franchise Association (BFA) mendefinisikan *franchise* sebagai kontrak lisensi yang diberikan oleh suatu pihak yaitu, *franchisor* kepada pihak lain yakni, *franchisee*, dengan perincian sebagai berikut (Supardiono, 2014):

- a. mengizinkan *franchisee* untuk menjalankan usaha selama periode *franchise* berlangsung, suatu usaha tertentu yang menjadi milik *franchisor*;
- b. *franchisor* berhak untuk menjalankan kontrol yang berlanjut selama periode *franchise*;
- c. mengharuskan kepada *franchisor* untuk memberikan bantuan kepada *franchisee* dalam melaksanakan usahanya sesuai dengan subyek *franchiseenya* dalam hal pemberian pelatihan, *merchandising*, atau lainnya;
- d. mewajibkan kepada *franchisee* untuk secara periodik selama periode kerja sama *franchise* berlangsung, membayar sejumlah uang sebagai pembayaran atas *franchise* atau produk atau jasa yang diberikan oleh *franchisor* kepada *franchisee*; dan
- e. bukan merupakan transaksi antara perusahaan induk (*holding company*) dengan cabangnya atau antara cabang dari perusahaan induk yang sama atau antara individu dengan perusahaan yang dikontrolnya.

Franchisor merupakan pemberi waralaba, yaitu badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau

penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. sedangkan *franchisee* adalah penerima waralaba yang merupakan badan usaha atau perorangan yang merupakan badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Konsep *franchise* dapat diaplikasikan dalam pengembangan ternak sapi dengan melibatkan perusahaan peternakan yang memiliki pengalaman dan reputasi yang baik melalui suatu fasilitasi dari pemerintah. Model ini relatif baru di bidang peternakan dan oleh karena itu perlu pengkajian mendalam yang dilakukan oleh pemerintah. Kelebihan pola ini bahwa pengembangan ternak sapi dapat terdistribusi secara spasial karena para *franchisee* dapat memilih lokasi di setiap sentra produksi ternak sapi, meskipun usaha *franchisor* ada di Jawa.

Pelibatan kelompok peternak sapi menjadi kekuatan tersendiri untuk mendorong peternakan sapi rakyat, dan dengan melibatkan *franchisee* mendorong usaha menengah dan koperasi. Model ini bisa menjadi andalan untuk mempercepat akselerasi pembangunan industri ternak sapi potong apabila kita lihat perkembangan jenis-jenis usaha *franchise* yang ada, terutama usaha mini market yang mengalami perkembangan luar biasa. Pertanyaan yang relevan adalah apa yang menjadi objek *franchising*? Sesuai dengan karakteristik usaha peternakan, maka yang potensial untuk menjadi objek *franchise* antara lain adalah bibit sapi/bakalan, teknologi pakan maupun teknologi budi daya, dan pakan. Sebetulnya untuk daging sapi praktik *franchise* ini sudah ada yang mengembangkan meskipun masih dalam skala kecil dan terbatas (Nuhung, 2015). Perusahaan *franchisor* tidak membutuhkan modal terlalu besar karena *franchisee* akan menyediakan infrastruktur sendiri yang biasanya menjadi jaminan bagi *franchisor*. Infrastruktur tersebut seperti kandang, lahan, tenaga kerja, dan infrastruktur lainnya. Mungkin yang perlu dikaji adalah skala usaha di tingkat *franchisee* dan hubungan antara *franchisee* dengan peternak kecil. Karena model ini merupakan sesuatu yang baru untuk usaha peternakan sapi potong, maka perlu dilakukan pengkajian mendalam oleh pemerintah. Di samping itu, dengan dipelopori oleh pemerintah dan daerah melalui perusahaan BUMN/BUMD bisa dilakukan uji coba sebagai pilot proyek. Pada Gambar 3 disajikan skema *franchise* usaha sapi potong.



Gambar 3. Skema Model Waralaba (Nuhung, 2015)

3. Model Unit Pelaksana Pengembangan dan Pembinaan Peternakan Sapi (UP4S/UPTD)

Model ini diilhami dari pola pengembangan perkebunan dalam kelembagaan UPP (Unit Pelaksana Proyek) di tahun 1980-an, yang melibatkan 100% petani sebagai peserta dan program ini dibiayai APBN melalui Badan Layanan Umum (BLU) dari Kementerian Keuangan. Tentu terdapat perbedaan di dalam mengelola usaha perkebunan dan ternak sapi, akan tetapi prinsip skemanya bisa dikembangkan dan dimodifikasi sesuai dengan sifat dan karakteristik peternakan.

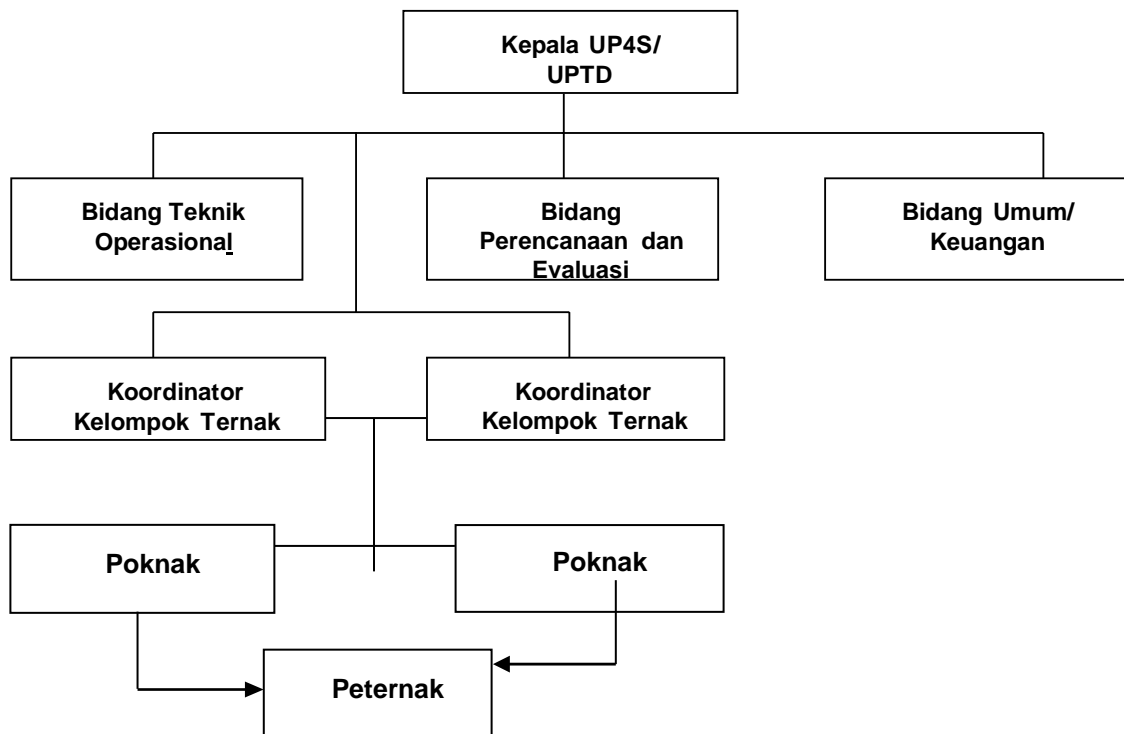
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberikan peluang bagi UPTD melakukan bisnis yang sehat melalui pengembangan sapi potong dengan model UP4S. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut bahwa BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan. Selanjutnya pada Pasal 29 dalam tahapan penerapan BLUD, Unit Pelaksana Teknis Daerah yang akan menerapkan BLUD harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan, meliputi: (a) persyaratan substantif, (b) persyaratan teknis, dan (c) persyaratan administratif.

Model UP4S/UPTD pada hakekatnya adalah model pembangunan peternakan melalui pemberdayaan peternak dan mendorong peternak dari peternak tradisional menjadi peternak komersial yang terintegrasi dengan pasar. Model UP4S dapat menggunakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang ada di daerah sebagai lembaga atau unit pengelolanya, meliputi fasilitasi dan penguatan kelembagaan, manajemen dan sumber daya manusianya yang dibiayai oleh pemerintah daerah dari pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.

UP4S/UPTD yang dapat dikembangkan menjadi pengelola, selain harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administrasi; juga yang terpenting bahwa wilayah disekitar UP4S/UPTD dapat dikembangkan peternakan sapi harus memenuhi skala ekonomi. Oleh karena itu, pada tahap awal pengembangan paket dari program tersebut adalah penguatan manajemen UPTD sebagai upaya mempersiapkan menjadi pengelola UP4S. Setiap UP4S ditetapkan skala usahanya dan jumlah sapi yang dipelihara oleh peternak yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya dalam wilayah. Peternak sapi dibagi dalam kelompok peternak dan dalam jumlah tertentu dibina oleh seorang petugas UP4S/UPTD, sehingga terjadi transfer teknologi dengan baik.

UP4S/UPTD juga berfungsi sebagai pembeli sapi peternak binaannya, dengan suatu sistem dan harga yang disepakati. Dalam model ini, sapi yang dikembangkan dengan sistem integrasi sawit-sapi atau sapi dengan tanaman lain bisadiintegrasikan dalam pola ini, sehingga kelembagaan pengelolaannya semakin kuat dan pasarnya juga menjadi jelas dan terjamin.

Program ini pada tahap awal sebaiknya merupakan program/ proyek pemerintah daerah, namun dalam jangka panjang dapat dikerjasamakan dengan swasta. Untuk penentuan skala usaha, perlu dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar tidak terjadi *over/ under capacity* dari UPTD; namun seperti diketahui bahwa UPTD dapat ditingkatkan kapasitasnya, dapat dimodernisasi sehingga sangat memungkinkan untuk menjadi pengelola UP4S. Jadi, dalam paket program yang merupakan proyek pemerintah ini terdapat kegiatan penguatan UPTD, baik kapasitas, peralatannya, sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi, kelembagaan dan manajemen, serta panduannya. Dengan demikian, UPTD dipersiapkan dengan baik sebagai pengelola program UP4S dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Adapun struktur organisasi dari UP4S ini dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:



Gambar 4. Struktur organisasi model UP4S/UPTD (Nuhung, 2015)

Pejabat Pengelola, Pembina dan Pengawas akan merujuk dan menyesuaikan dengan susunan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang diatur

PENUTUP

Potensi sumber daya alam, budaya, dan pengalaman sejarah pengembangan sapi Indonesia, mengandung optimisme jika suatu saat Indonesia mampu untuk mewujudkan swasembada daging sapi berkelanjutan, bahkan sangat berpeluang untuk kembali berstatus sebagai eksportir sapi di kawasan Asia Tenggara dan negara lainnya. Untuk meraih harapan tersebut, langkah-langkah yang perlu dikembangkan adalah: (i) dukungan politik yang kuat dalam bentuk regulasi yang memberi ruang gerak bagi pembangunan industri peternakan sapi potong; (ii) kebijakan yang tegas dan berpihak kepada peternakan sapi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik; (iii) tersedianya lahan pengembangan yang dialokasikan oleh pemerintah khusus untuk pengembangan peternakan sapi potong; dan (iv) pembangunan *breeding farm* untuk menjadi sumber bibit sapi unggul. Pada tahap awal, hal-hal tersebut, perlu diinisiasi dan dibiayai oleh pemerintah pusat dan daerah melalui dana APBN/ APBD/ BLUD.

Pemasaran dan harga produk perlu ada jaminan yang pasti melalui pengaturan dari pemerintah serta sumber pembiayaan yang jelas, misalnya alokasi khusus APBN/ APBD untuk pengembangan UP4S/UPTD; dan tersedianya spesial skema pembiayaan perbankan untuk pembangunan peternakan sapi dengan tingkat suku bunga yang rendah.

Paradigma baru manajemen pembangunan peternakan sapi potong dengan melibatkan dunia usaha sebagai investor membangun peternakan skala besar, tidak hanya beroperasi pada kegiatan perdagangan/ impornya. Kemudian, perlu dibuat *pilot project* dengan menggunakan model-model pengembangan yang telah diuraikan di atas yang tentunya didahului dengan kajian lebih mendalam.

Pengkajian komprehensif terhadap kebijakan, model pengembangan, dan aspek teknis, sosial ekonomi, dan lingkungan pengembangan ternak sapi yang bersifat terobosan harus dilakukan dengan melibatkan dunia akademik dan lembaga penelitian terakreditasi. Pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan mampu membangun koordinasi yang efektif baik antara Kementerian, Direktorat Jenderal Tehnis, Dinas yang membidangi fungsi Peternakan, dan antarpelaku usaha agribisnis sapi potong.

Koordinasi yang efektif antar *stakeholders* dan antarpelaku usaha diharapkan dapat mendorong terjadinya keterpaduan proses produksi dan antarpelaku usaha agribisnis daging sapi.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Peternakan Dalam Angka 2020. Nomor Katalog: 5301008; Nomor Publikasi: 05210.2002; ISSN/ISBN: 2714-8416; Tanggal-Rilis: 2020-06-10
- Ditjen Peternakan. 2020. Statistik Peternakan 2020 Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan.
- Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. 2020. Laporan Tahunan Bidang Peternakan dan Penyuluhan, (2020).
- Ilham, N. 2006. Analisis sosial ekonomi dan strategi pencapaian swasembada daging 2010. Analisis Kebijakan Pertanian 4(2):131-145
- Muslim, C. 2006. Pengembangan sistem integrasi padi-ternak dalam upaya pencapaian swasembada daging di Indonesia, suatu tinjauan evaluasi. Analisis Kebijakan Pertanian 4(3):226-239.
- Nuhung, I.A. 2015. Agribisnis Berkarakter ke Indonesiaan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Nuhung, I.A. 2003. Perusahaan Inti Rakyat dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Penerbit Yasrip.
- [Puslitbangnak] Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2013. Pengembangan Investasi Sapi Potong di dalam Negeri. Jakarta: IAARD Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun. 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategi Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI).
- Supardiono, D. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Franchise dalam Meningkatkan Kinerja Franchisee. Tesis Magister Agribisnis. Jakarta: FST-UIN yarif Hidayatullah.